



Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Zikratun Nisak¹, Muhammad Rasyidin^{2,*}, Azka Rizkina¹, Muhammad Rizal¹

¹Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Ritel, Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia

Email: ¹zikratunnisak22@gmail.com, ^{2,*}m_rasyidin@yahoo.com, ³azkaa_rizkina@yahoo.co.id, ⁴muhammadrizal@umuslim.ac.id

Email Penulis Korespondensi: m_rasyidin@yahoo.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Objek penelitian mencakup data kinerja keuangan (PAD, Belanja Daerah, dan APBD) serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari tahun 1993 hingga 2022, bersumber dari BPS Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, yang disebabkan oleh kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah, seperti penyalahgunaan dana atau investasi yang tidak produktif. Selain itu, rasio efektivitas PAD juga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, karena kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada sektor tertentu seperti pajak properti atau pajak hotel dan restoran. Sebaliknya, rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Efisiensi dalam penggunaan dana meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pendidikan, yang secara langsung berkontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Efektivitas PAD; Efisiensi Keuangan Daerah; Pertumbuhan Ekonomi

Abstract—This study seeks to evaluate the impact of regional financial independence ratios, PAD effectiveness ratios, and regional financial efficiency ratios on economic growth in Aceh Province. The research focuses on financial performance data, including PAD, regional expenditures, and the APBD, along with economic growth metrics. The location of the study is Aceh Province, utilizing secondary data from 1993-2022 obtained from BPS Aceh Province. The findings indicate that the regional financial independence ratio does not significantly affect economic growth in Aceh Province, due to inefficiencies in the use of regional financial resources, such as fund mismanagement or unproductive investments. Similarly, the PAD effectiveness ratio shows no impact on economic growth, attributed to the lack of income source diversification, with many regions relying predominantly on specific sectors like property taxes or hotel and restaurant taxes. Conversely, the regional financial efficiency ratio positively influences economic growth, as efficient fund utilization enhances infrastructure and education availability, directly boosting labor productivity and regional competitiveness.

Keywords: Regional Financial Independence; PAD Effectiveness; Regional Financial Efficiency; Economic Growth

1. PENDAHULUAN

Perekonomian sebuah wilayah dapat diukur melalui tingkat pertumbuhannya. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, perekonomian wilayah tersebut juga akan mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi percepatan dan peningkatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi yang stabil merupakan cita-cita bagi seluruh masyarakat dan pemerintah di suatu daerah. Untuk mewujudkannya, masyarakat dan pemerintah tersebut memerlukan strategi yang efektif. Proses menuju ekonomi yang makmur dan sejahtera disebut pembangunan. Pembangunan mencakup langkah-langkah atau proses untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah. Ini meliputi perubahan dari kondisi primitif ke modern, peningkatan wawasan dan keterampilan masyarakat, serta transisi dari sektor agraris ke industrialisasi dengan tujuan pertumbuhan ekonomi (Ayuningtyas, 2021). PDRB mencakup komponen seperti upah dan gaji, bunga, sewa tanah, pajak tidak langsung, penyusutan, dan keuntungan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tertinggi pada tahun 2022 sebesar 140,947,643.60, pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi dan juga didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah, sehingga menyebabkan ekonomi di Provinsi Aceh meningkat, sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar 126,824,491.42, rendahnya pertumbuhan ekonomi dengan indikator pertumbuhan PDB pada tahun 2018 dikarenakan terkena dampak dari melemahnya pertumbuhan ekonomi antar daerah dan inflasi yang cenderung tinggi (BPS Aceh, 2023).

Pembangunan daerah adalah bagian yang sangat penting dan merupakan penjelasan mendalam dari pembangunan nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan potensi, aspirasi, dan masalah spesifik di masing-masing daerah. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan meningkatkan manfaat serta hasil pembangunan bagi masyarakat secara adil dan merata. Kabupaten/kota berfungsi sebagai daerah otonom yang melaksanakan pembangunan, sementara provinsi bertindak sebagai koordinator dengan wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola kepentingan masyarakat. Provinsi harus menerapkan prinsip transparansi, melibatkan masyarakat dalam prosesnya, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. (Kamaludin, 2020).

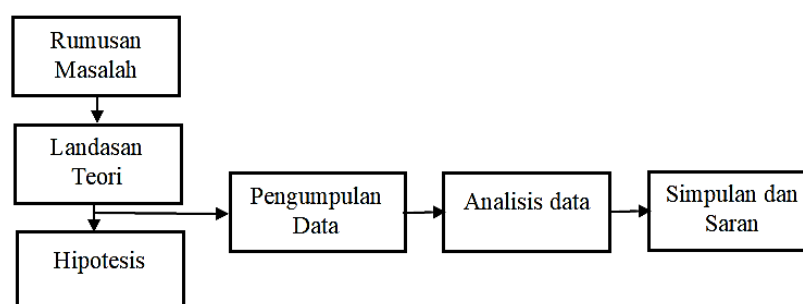
Pembangunan ekonomi adalah faktor krusial yang berkontribusi pada kesuksesan pembangunan nasional. Dorongan tersebut mencakup percepatan pemulihan ekonomi serta penguatan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi. Pentingnya hal ini terletak pada bagaimana

masalah dan tantangan diatasi serta arah kebijakan pembangunan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 4, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara teratur, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab, sambil tetap memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, sesuai dengan ketentuan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PAD di Provinsi Aceh tertinggi pada tahun 2019 sebesar 2,589,284,044,683 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 2,184,607,197,048. Belanja Daerah di Provinsi Aceh tertinggi pada tahun 2018 sebesar 14,325,296,569,210 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 12,200,008,162,753. Sedangkan APBD di Provinsi Aceh tertinggi pada tahun 2019 sebesar 15,692,775,230,941 dan terendah pada tahun 2022 sebesar 13,413,980,404,477. Penurunan kinerja keuangan dapat terjadi jika pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, jika kinerja keuangan meningkat, hal itu mungkin disebabkan oleh adanya pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah, termasuk anggaran dan belanja modal, serta dinilai berdasarkan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk satu periode anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diambil dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, khususnya perhitungan anggaran. Dalam organisasi pemerintahan, ukuran kinerja keuangan meliputi kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efisiensi PAD, keserasian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kinerja keuangan (Dwirandra, 2020). Pemerintah daerah diharapkan memiliki kapasitas keuangan yang lebih baik untuk melaksanakan kinerja keuangan dan desentralisasi fiskal. Dengan berkurangnya campur tangan dari pemerintah pusat, diharapkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka akan meningkat. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip transparansi, kejujuran, efektivitas, efisiensi, demokrasi, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Objek dari penelitian ini meliputi data terkait kinerja keuangan (seperti PAD, belanja daerah, dan APBD) serta pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif, di mana penelitian disusun secara sistematis dengan mengaitkan berbagai bagian, fenomena, dan hubungan dalam objek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model matematis menggunakan teori, penelitian sebelumnya, serta hipotesis terkait suatu peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi data kinerja keuangan (PAD, Belanja Daerah, dan APBD) serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dengan periode dari tahun 1993 hingga 2022. Sumber data ini diambil dari Website Badan Pusat Statistik Indonesia. (www.bps.go.id). Adapun tahapan penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Tahapan Penelitian

2.1 Metode Analisis Data

2.1.1 Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas dalam model regresi bertujuan untuk menentukan apakah nilai residual dari regresi terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji One Sample Kolmogorov yang terdapat dalam program SPSS (Purnomo, 2020). Sedangkan uji multikolinieritas mengacu pada adanya hubungan linear antara variabel bebas X dalam Model Regresi Ganda. Jika variabel-variabel bebas X dalam model regresi ini menunjukkan korelasi yang sempurna, maka terjadi kolinearitas ganda yang sempurna. Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi seperti itu dalam regresi. Jika multikolinieritas terjadi, koefisien regresi untuk variabel bebas bisa menjadi tidak signifikan dan memiliki standard error yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, semakin baik model regresinya (Purnomo, 2020).

Uji heteroskedastisitas mengacu pada ketidaksamaan varian residual di seluruh pengamatan dalam model regresi. Salah satu cara untuk memeriksa hal ini adalah dengan uji Glejser, yang merupakan metode hipotesis untuk



mengidentifikasi apakah sebuah model regresi menunjukkan indikasi heteroskedastisitas dengan melakukan regresi terhadap nilai absolut residual. Uji autokorelasi berhubungan dengan dampak dari pengamatan atau data dalam suatu variabel yang saling terhubung. Nilai dari suatu data bisa dipengaruhi atau terkait dengan data lainnya (atau data sebelumnya) (Purnomo, 2020).

2.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Marwan (2019) penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu menganalisis data-data yang telah terkumpul guna untuk menjelaskan pengaruh antara variabel dalam penelitian, dimana data-data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan, kemudian dianalisis signifikan. Berdasarkan fungsi model data semua variabel memiliki kesamaan skala ukur, akan tetapi dalam pendataan ini pertumbuhan ekonomi memiliki perbedaan skala ukur dengan rasio kinerja keuangan maka model nya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \tag{1}$$

Keterangan :

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- X₁ = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- X₂ = Rasio Efektivitas PAD
- X₃ = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
- a = Konstanta
- b_{1,2,3} = Koefisien yang di cari
- e = Standar Error

3. HASIL Dan PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kategori
1993	20.16	Rendah Sekali
1994	21.34	Rendah Sekali
1995	29.47	Rendah
1996	34.28	Rendah
1997	20.82	Rendah Sekali
1998	12.96	Rendah Sekali
1999	7.76	Rendah Sekali
2000	7.68	Rendah Sekali
2001	2.80	Rendah Sekali
2002	5.57	Rendah Sekali
2003	5.44	Rendah Sekali
2004	9.34	Rendah Sekali
2005	4.22	Rendah Sekali
2006	11.28	Rendah Sekali
2007	15.68	Rendah Sekali
2008	12.84	Rendah Sekali
2009	12.85	Rendah Sekali
2010	12.96	Rendah Sekali
2011	11.72	Rendah Sekali
2012	9.72	Rendah Sekali
2013	15.70	Rendah Sekali
2014	18.80	Rendah Sekali
2015	19.18	Rendah Sekali
2016	20.18	Rendah Sekali
2017	18.71	Rendah Sekali
2018	18.94	Rendah Sekali
2019	19.80	Rendah Sekali
2020	18.48	Rendah Sekali
2021	21.00	Rendah Sekali
2022	23.77	Rendah Sekali
Total	15.45	Rendah Sekali



Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) di Provinsi Aceh dari tahun 1993-2022 hanya pada tahun 1995 dan 1996 berada pada kategori rendah, selebihnya berada pada kategori rendah sekali, sedangkan secara keseluruhan didapatkan pada kategori rendah sekali dengan nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) sebesar 15.45%.

Tabel 4. Rasio Efektivitas PAD di Provinsi Aceh

Tahun	Rasio Efektivitas PAD	Kategori
1993	96.65	Cukup Efektif
1994	90.65	Cukup Efektif
1995	65.66	Tidak Efektif
1996	83.35	Kurang Efektif
1997	75.16	Kurang Efektif
1998	92.94	Cukup Efektif
1999	96.11	Cukup Efektif
2000	169.12	Sangat Efektif
2001	236.95	Sangat Efektif
2002	99.44	Cukup Efektif
2003	99.08	Cukup Efektif
2004	79.01	Kurang Efektif
2005	96.99	Cukup Efektif
2006	129.09	Sangat Efektif
2007	84.69	Kurang Efektif
2008	90.02	Cukup Efektif
2009	90.00	Cukup Efektif
2010	99.51	Cukup Efektif
2011	100.70	Sangat Efektif
2012	112.11	Sangat Efektif
2013	90.47	Cukup Efektif
2014	93.61	Cukup Efektif
2015	96.24	Cukup Efektif
2016	99.14	Cukup Efektif
2017	101.29	Sangat Efektif
2018	101.49	Sangat Efektif
2019	104.23	Sangat Efektif
2020	117.68	Sangat Efektif
2021	104.34	Sangat Efektif
2022	113.39	Sangat Efektif
Total	103.64	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan Rasio Efektivitas PAD di Provinsi Aceh dari tahun 1993-2022 hanya pada tahun 1995 berada pada kategori tidak efektif, tahun 1996, 1997, 2004 dan 2007 berada pada kategori kurang efektif, tahun 1993, 1994, 1998, 1999, 2002, 2003, 2008-2010 dan 2013-2016 berada pada kategori cukup efektif, selebihnya berada pada kategori sangat efektif, sedangkan secara keseluruhan didapatkan pada kategori sangat efektif dengan nilai Rasio Efektivitas PAD sebesar 103.64%.

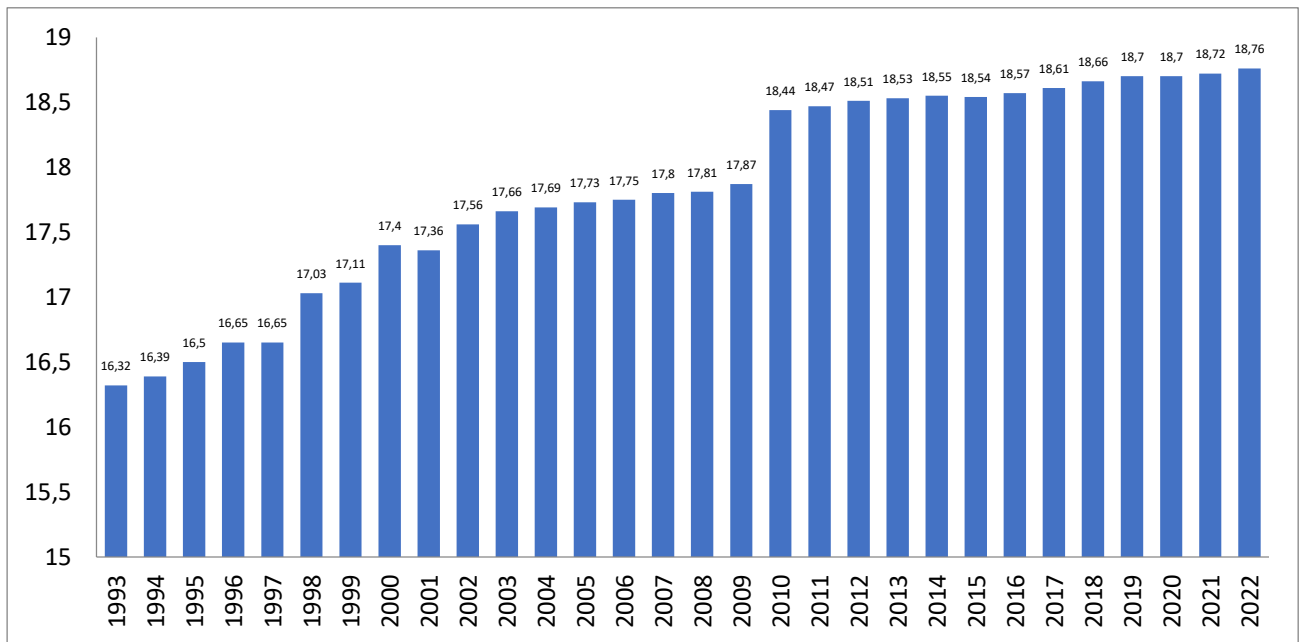
Tabel 5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Provinsi Aceh

Tahun	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Kategori
1993	71.77	Efisien
1994	75.46	Efisien
1995	77.20	Efisien
1996	90.51	Kurang Efisien
1997	80.88	Cukup Efisien
1998	65.28	Efisien
1999	107.10	Tidak Efisien
2000	116.62	Tidak Efisien
2001	92.87	Kurang Efisien
2002	89.61	Cukup Efisien
2003	84.24	Cukup Efisien
2004	76.85	Efisien
2005	65.36	Efisien
2006	63.42	Efisien
2007	60.06	Efisien

Tahun	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Kategori
2008	82.69	Cukup Efisien
2009	82.69	Cukup Efisien
2010	108.61	Tidak Efisien
2011	96.97	Kurang Efisien
2012	95.39	Kurang Efisien
2013	105.29	Tidak Efisien
2014	104.12	Tidak Efisien
2015	106.25	Tidak Efisien
2016	98.06	Kurang Efisien
2017	84.84	Cukup Efisien
2018	97.97	Kurang Efisien
2019	89.15	Cukup Efisien
2020	87.11	Cukup Efisien
2021	97.53	Kurang Efisien
2022	102.18	Tidak Efisien
Total	88.53	Cukup Efisien

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Provinsi Aceh dari tahun 1993-2022, didapatkan pada tahun 1996, 1999, 2000, 2010, 2013-2015 dan 2022 berada pada kategori tidak efisien, tahun 1996, 2001, 2011, 2012, 2016 dan 2021 berada pada kategori kurang efisien, tahun 1997, 2002, 2003, 2008, 2009, 2017, 2019 dan 2020 berada pada kategori cukup efisien, selebihnya berada pada kategori sangat efisien, sedangkan secara keseluruhan didapatkan pada kategori cukup efisien dengan nilai Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sebesar 88.53%.

3.1.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dari tahun 1993-2022 bersifat fluktuatif dimana terendah pada tahun 1995 sebesar 16.50% dan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 18.87%.

3.1.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 6. Hasil Pengujian Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		RKKD	RE PAD	REKD	Ln_PE
N		30	30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	15.4483	103.6370	88.5360	17.8341
	Std. Deviation	7.34917	31.03423	14.80988	.79626
	Absolute	.127	.291	.082	.208
Most Extreme Differences	Positive	.111	.291	.075	.121
	Negative	.127	.164	.082	-.208

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
	RKKD	RE PAD	REKD	Ln_PE
Kolmogorov-Smirnov Z	.694	1.594	.450	1.142
Asymp. Sig. (2-tailed)	.721	.112	.987	.147

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki nilai signifikansi 0.721, yang lebih besar dari 0.05. Begitu pula dengan rasio efektivitas PAD yang bernilai 0.112, rasio efisiensi keuangan daerah yang bernilai 0.987, dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai signifikansi 0.147. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 7. Uji nilai VIF dan Tolerance

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1	RKKD	.774 1.292
	RE PAD	.722 1.385
	REKD	.911 1.098

a. Dependent Variable: Ln_PE

Berdasarkan tabel 7, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Tabel 8. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a	
		Sig
(Constant)		0.731
1	RKKD	0.106
	RE PAD	0.118
	REKD	0.792

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan Tabel 8, nilai signifikansi untuk rasio kemandirian keuangan daerah adalah 0.106, yang lebih besar dari 0.05; nilai signifikansi untuk rasio efektivitas PAD adalah 0.118, juga lebih besar dari 0.05; dan nilai signifikansi untuk rasio efisiensi keuangan daerah adalah 0.792, yang jauh lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.1.3 Uji Autokorelasi

Tabel 9. Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.837

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan Tabel 9, nilai Durbin Watson sebesar 1.237 terletak di antara batas atas dU, yaitu 1.738, dan nilai (4-dU) yang merupakan 2.232 (4-1.738). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

3.1.4 Analisis Model Regresi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Berdasarkan analisis data, diperoleh model regresi untuk kedua ukuran yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Analisis Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
(Constant)	16.052	.987		16.270	.000	
1	RKKD	.015	.021	16.270	.682	.501
	RE PAD	.003	.005	.682	.494	.626
	REKD	.026	.010	.478	2.629	.014



Dari persamaan analisis linier berganda didapatkan konstanta sebesar 16.052. Artinya jika variabel pertumbuhan ekonomi (Y) dipengaruhi oleh ke tiga variabel bebasnya yaitu variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah atau sama dengan 1, maka nilai keputusan pertumbuhan ekonomi (Y) akan bertambah sebesar 16.052. Sedangkan koefisien regresi variabel rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) sebesar 0.015, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) mengalami kenaikan 1%, maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.015. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) dengan pertumbuhan ekonomi (Y).

Koefisien regresi variabel rasio efektivitas PAD (X_2) sebesar = 0.003, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan rasio efektivitas PAD (X_2) mengalami kenaikan 1%, maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar = 0.003. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara rasio efektivitas PAD (X_2) dengan pertumbuhan ekonomi (Y). Sementara koefisien $b_3 = 0.026$. Koefisien regresi variabel rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) sebesar 0.026, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) mengalami kenaikan 1%, maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.026. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) dengan pertumbuhan ekonomi (Y).

Berdasarkan hasil tabel 10 menunjukkan bahwa nilai statistik-t untuk koefisien rasio kemandirian keuangan daerah (X_1) pada model regresi sebesar = 0.682, nilai ini signifikan pada taraf uji sig= 0.501. Sedangkan penelitian ini menetapkan t taraf uji-nya ($\alpha = 5\%$ atau 0.05), hal ini membuktikan bahwa sig 0.501 > 0.05 yang berarti H_1 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Untuk koefisien rasio efektivitas PAD (X_2) pada model regresi sebesar = 0.494, nilai ini signifikan pada taraf uji sig= 0.626. Sedangkan penelitian ini menetapkan t taraf uji-nya ($\alpha = 5\%$ atau 0.05), hal ini membuktikan bahwa sig 0.626 > 0.05 yang berarti H_2 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Untuk koefisien rasio efisiensi keuangan daerah (X_3) pada model regresi sebesar = 2.629, nilai ini signifikan pada taraf uji sig= 0.014. Sedangkan penelitian ini menetapkan t taraf uji-nya ($\alpha = 5\%$ atau 0.05), hal ini membuktikan bahwa sig 0.014 < 0.05 yang berarti H_3 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Penyebab rasio kemandirian keuangan daerah yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah, seperti penyalahgunaan dana atau investasi yang tidak produktif. Kedua, keterbatasan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang efektif. Selain itu, adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal alokasi dana dan kebijakan fiskal juga dapat membatasi kemandirian keuangan daerah. Terakhir, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global atau perubahan regulasi pemerintah pusat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, tidak hanya bergantung pada rasio kemandirian keuangan.

Kemandirian daerah adalah ukuran keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Suatu daerah dianggap mandiri jika mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU dan DAK. Dengan meningkatnya PAD, sektor-sektor UMKM di daerah akan berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Pencapaian ini dapat diwujudkan melalui peran serta pemangku kepentingan lokal, seperti kepala daerah dan perwakilan legislatif, yang melalui kebijakan-kebijakan mereka dapat mengeksplorasi potensi daerah dan mendorong peningkatan PAD serta pertumbuhan ekonomi (Manggu, 2019).

Menurut Ferani (2021) rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Ketergantungan yang berlebihan pada transfer pusat dapat membuat daerah rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal nasional dan perubahan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, terlalu bergantung pada sumber daya dari pemerintah pusat juga dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat menjadi strategi penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

3.2.2 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Salah satu penyebab rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah. Banyak daerah masih sangat bergantung pada sektor tertentu dalam menghasilkan PAD, seperti pajak properti atau pajak hotel dan restoran. Ketika sektor-sektor ini mengalami fluktuasi atau penurunan, PAD pun terdampak, mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan daerah dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, rendahnya kualitas infrastruktur dan kurangnya



investasi dalam sektor-sektor kunci juga dapat menghambat efek positif PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, karena infrastruktur yang buruk dapat menjadi hambatan bagi pengembangan bisnis dan investasi di daerah tersebut.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, dan efektivitas dalam pengelolaannya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Dengan rasio efektivitas yang tinggi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan meningkatkan penerimaan PAD, yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur, pengembangan sektor pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, rasio efektivitas PAD yang baik dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Putri, 2020).

Jika rasio efektivitas PAD rendah, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Ketidakmampuan dalam mengelola pendapatan lokal secara efisien dapat menyebabkan keterbatasan dana untuk investasi pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi. Kurangnya investasi ini dapat berdampak negatif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing daerah dalam pasar ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman dan perhatian yang cermat terhadap rasio efektivitas PAD merupakan faktor penting bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan membangun daya saing wilayahnya (Hamzah, 2021).

3.2.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat dan efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik bagi sektor swasta, merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Penggunaan dana publik yang efisien dapat meningkatkan ketersediaan layanan dasar seperti infrastruktur dan pendidikan, yang berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah dalam ekonomi global. Dengan demikian, efisiensi keuangan daerah bukan hanya menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga berperan dalam pembentukan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang.

Rasio efisiensi daerah adalah ukuran yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Efisiensi diukur dengan membandingkan output dengan input. Semakin besar output dibandingkan dengan input, semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara pengeluaran (belanja) dan penerimaan daerah yang sebenarnya. Untuk menganalisis tingkat efisiensi keuangan daerah, dapat digunakan rasio efisiensi, yang menunjukkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah (Dwirandra, 2020).

Menurut Ferani (2021) rasio efisiensi keuangan daerah memainkan peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Keuangan daerah yang dikelola secara efisien dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia. Rasio efisiensi keuangan, seperti rasio belanja operasional terhadap pendapatan daerah, rasio utang daerah terhadap pendapatan daerah, dan rasio penerimaan pajak terhadap total pendapatan, mencerminkan sejauh mana keuangan daerah dapat mendukung keberlanjutan ekonomi. Jika daerah berhasil mengelola keuangan dengan baik, misalnya dengan mengurangi beban utang, mengalokasikan anggaran secara efisien, dan meningkatkan pendapatan pajak, hal ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika anggaran daerah tidak diarahkan dengan baik atau terjadi penyalahgunaan dana, hal ini dapat menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka agar dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Handayani, 2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, penulis memperoleh beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, hal ini disebabkan oleh kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah, seperti penyalahgunaan dana atau investasi yang tidak produktif. Rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, hal ini disebabkan kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah. Banyak daerah masih sangat bergantung pada sektor tertentu dalam menghasilkan PAD, seperti pajak properti atau pajak hotel dan restoran. Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dikarenakan penggunaan dana yang efisien dapat meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pendidikan, yang berkontribusi secara langsung terhadap produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah.



REFERENCES

- Adiwarman, A. Karim. (2021). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Alfionita, Y. D. (2019). Peran Good Corporate Governance Pada Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 20(1), 1-14.
- Achmad, A Thobarry. (2019). Analisis Pengaruh, Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Inflasi, dan Pertumbuhan GDP Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti. *E-Jurnal STIE INABA*, 15(2), 1-24.
- Ayuningtyas, Dumilah. (2021). *Kebijakan Publik: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *EJurnal Akuntansi*, 6(1), 481-497.
- Ferani, I. (2021). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayama*. 75(5), 533-556.
- Hamzah, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur). *Jurnal SNA XI Pontianak*, 24(47), 113-126.
- Harinaldi. (2019). *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Semen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011). *Jurnal Administrasi Bisnis*. 2 (1), 82–89.
- Hermawan, A. (2019). *Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Iskandar, R. (2019). Pengaruh Inflasi, Kurs, Tingkat Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Jumlah DPK Bank Syariah. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 4(1), 397-415.
- Kamaludin. (2020). *Manajemen Keuangan “Konsep Dasar dan Penerapannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marwan, H., Ibrahim, S., Win K., dan Yusrizal, A. (2019). *Analisis Jalur Dan Aplikasi Spss Versi 25*. Medan: Sefa Bumi Persada.
- Manggu, S. A. R. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene. *Jurnal Akrab Juara*, 4(1), 45-55.
- Patriati, Ranti. (2020). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 24-39.
- Purnomo S, Husaini. (2020). *Metodologi Penelitian. Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Putri. (2020). Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan PT. Campina. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1), 1-18.
- Ramadani, R. F. (2019). Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomia*, 5(3), 327-345.
- Rochmah, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(19), 7-17.
- Samuelson, P, A. (2020). *Ilmu Mikroekonomi Edisi Ketujuh Belas*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Supriati. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Dian. Rakyat.
- Sumarjo, H. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 1-17.
- Syofian. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar.
- Syamsi, Ibnu. (2019). *Efisiensi, Sistem Dan Prosedur Kerja*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Yesica, L. (2019). Pengaruh Inflasi, Investasi, Nilai Tukar, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. 1(1), 32–38.